

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Teori stakeholder ditemukan oleh R. Edward Freeman (1984) melalui karyanya *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, yang merevolusi cara pandang korporasi terhadap tujuan bisnis yang. Dalam paradigma klasik kapitalisme, orientasi perusahaan cenderung terfokus pada kepentingan pemegang saham (*shareholder value*). Namun, Freeman memperluas cakupan tanggung jawab perusahaan dengan menyatakan menyatakan bahwa keberhasilan kesuksesan suatu bisnis tidak hanya ditentukan Penelitian ini hanya meneliti perusahaan di bidang properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan di bidang properti dan real estate yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak dimasukkan dalam penelitian ini meskipun mereka berada di sektor yang sama. aktivitas perusahaan (*stakeholders*), seperti konsumen, karyawan, masyarakat, pemerintah, investor, serta lingkungan alam (freeman, 1984).

Dalam konteks tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, teori stakeholder menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan strategis untuk menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak tersebut agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Menurut Setiawan & Larasti (2021), penerapan CSR di Indonesia tidak semata bertujuan memenuhi peraturan pemerintah atau citra sosial, tetapi berfungsi sebagai strategi kolaboratif untuk membangun legitimasi sosial dan menginternalisasi nilai keberlanjutan dalam

kegiatan operasional perusahaan. Mereka menegaskan bahwa dalam konteks SDGs, stakeholder tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat CSR, tetapi juga sebagai *co-creator* yang berkontribusi dalam perumusan dan implementasi program keberlanjutan, terutama di bidang lingkungan. Misalnya, dalam sektor properti dan real estate, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam menentukan desain proyek pembangunan yang ramah lingkungan, seperti penerapan *green building* dan manajemen limbah konstruksi.

Selanjutnya, Mahendra (2022) menguraikan bahwa perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI menggunakan prinsip teori stakeholder untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan lingkungan sosial-ekonomi di wilayah operasi mereka. Dalam konteks ini, CSR menjadi instrumen manajerial yang berfungsi menengahi hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sosial, di mana keputusan strategis seperti pembangunan kawasan hunian, fasilitas publik, dan pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta dampak ekologis.

Dari perspektif strategis, teori stakeholder juga menyoroti pentingnya *stakeholder engagement* sebagai variabel mediasi antara CSR dan kinerja lingkungan. Marsaoli (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan CSR secara langsung meningkatkan legitimasi sosial dan mengurangi konflik horizontal yang sering muncul akibat kegiatan industri yang berdampak lingkungan. Misalnya, melalui konsultasi publik, pelibatan LSM lingkungan, atau program pengawasan bersama atas dampak proyek, perusahaan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi lingkungan.

Dalam konteks real estate, kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk perencanaan tata ruang dan mitigasi risiko bencana alam menjadi contoh konkret penerapan prinsip stakeholder dalam praktik keberlanjutan.

Sementara itu, Widjaja, Din & Romle (2024) menekankan bahwa di era *Sustainable Finance*, teori stakeholder bertransformasi menjadi dasar bagi praktik *Environmental, Social, and Governance* disclosure. Perusahaan dianjurkan melakukan CSR, tetapi juga melaporkan kinerja sosial dan lingkungannya secara transparan untuk menjaga kepercayaan stakeholder finansial, terutama investor hijau. Keterbukaan informasi bagi pasar modal menjadi tata kelola yang etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan properti yang mengungkapkan inisiatif efisiensi energi atau konservasi lahan cenderung memperoleh persepsi positif dari investor dan regulator.

Penelitian Manurung & Pasaribu (2024) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan adanya pengaruh antara tingkat pengungkapan lingkungan di sektor properti dan real estate. Temuan ini memperlihatkan bahwa orientasi terhadap stakeholder baik masyarakat, investor, maupun pemerintah berperan sebagai katalis yang memperkuat hubungan antara CSR dan kinerja lingkungan, sehingga berdampak langsung pada nilai pasar dan keberlanjutan bisnis.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga menjadi aspek penting dalam teori stakeholder. Kuswantor & Sholihin (2022) menyoroti pentingnya sinergi antara perusahaan swasta, BUMN, dan lembaga pemerintah dalam implementasi SDGs di Indonesia. Dalam konteks lingkungan, kerja sama lintas pemangku kepentingan ini memperluas jangkauan dan efektivitas program CSR, seperti reboisasi, konservasi

sumber daya air, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Melalui kolaborasi tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa program CSR tidak hanya bersifat simbolis (*greenwashing*), tetapi benar-benar menghasilkan dampak lingkungan yang terukur. Dari sisi teoretis, teori stakeholder juga berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antara CSR dan pencapaian SDGs dimensi lingkungan melalui mekanisme mediasi seperti *stakeholder engagement* dan *sustainability disclosure*. Dalam model penelitian, teori ini berperan menjembatani variabel independen (CSR) dengan variabel dependen (kinerja lingkungan atau pencapaian SDGs). Semakin tinggi tingkat kolaborasi perusahaan dengan stakeholder, semakin besar pula efek CSR terhadap dimensi lingkungan SDGs.

Oleh teori stakeholder tidak hanya menjadi justifikasi etis atas tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga fondasi strategis yang menjelaskan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dapat memperkuat hubungan sebab-akibat antara CSR dan keberlanjutan lingkungan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi oleh Suchman (1995), yang menyatakan bahwa keberlangsungan Perusahaan bergantung pada sejauh mana masyarakat beroperasi sesuai dengan peraturan-peraturan dan nilai kepercayaan yang dibangun dalam masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan perlu mendapatkan penerimaan sosial dengan menyesuaikan aktivitasnya agar sesuai dengan nilai dan harapan Masyarakat. Dalam konteks CSR dan SDGs lingkungan yang menggunakan pelaporan keberlanjutan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, (Ionascu et al, 2020). Silva (2021)

menyoroti bahwa teori legitimasi yang digunakan perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan cenderung dominan simbolis, seperti transparansi dan transformasi, namun belum cukup mendorong perubahan nyata dalam praktik bisnis.

Teori legitimasi merupakan salah satu kerangka konseptual penting dalam studi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan keberlanjutan perusahaan. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa perusahaan beroperasi dalam suatu sistem sosial dan ekonomi yang memiliki “kontrak sosial” tidak tertulis dengan masyarakat (Suchman, 1995). Artinya, keberlangsungan operasi perusahaan bergantung pada sejauh mana masyarakat menilai aktivitas perusahaan sesuai. Ketika tindakan perusahaan dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi sosial misalnya karena kerusakan lingkungan atau eksploitasi sumber daya maka legitimasi sosial akan menurun dan dapat mengancam keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks CSR dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), teori menjelaskan bagaimana bisnis memperkuat hubungan mereka ikatandengan publik dengan menyatakan bahwa mereka melakukan tindakan yang wajar dan dapat diterima oleh publik, seperti pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*).

Penelitian oleh Gutierrez, ponce & Wibowo (2023) mengidentifikasi bahwa perusahaan publik di Indonesia menggunakan laporan keberlanjutan sebagai instrumen untuk mempertahankan legitimasi sosial, khususnya dalam menunjukkan kontribusi terhadap SDGs, terutama dimensi lingkungan. Melalui pengungkapan data kuantitatif dan kualitatif seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan reduksi emisi karbon, perusahaan berusaha menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya selaras dengan tujuan global keberlanjutan. Hal ini penting dalam

konteks sektor properti dan real estate, karena kegiatan pembangunan fisik sering menimbulkan dampak ekologis yang langsung dirasakan masyarakat, seperti alih fungsi lahan, kebisingan, dan polusi udara.

Sejalan dengan itu, Kuswantoro & Sholihin (2022) menekankan bahwa legitimasi lingkungan (*environmental legitimacy*) menjadi elemen sentral dalam hubungan antara CSR dan pencapaian SDGs. Mereka menemukan bahwa perusahaan swasta dan BUMN di Indonesia yang secara aktif melaporkan kinerja keberlanjutan melalui laporan tahunan dan pelaporan SDGs cenderung memperoleh kepercayaan publik yang lebih tinggi serta reputasi positif di mata regulator dan investor. Pengungkapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga stabilitas hubungan sosial di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan.

Penelitian Ravi & Mulya (2022) juga menjelaskan legitimasi teori berperan penting dalam menjelaskan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mereka besar cenderung melakukan pengungkapan CSR yang menunjukkan tanggung jawab sosial dan mengurangi tekanan masyarakat terhadap dampak negatif lingkungan. Pengungkapan tersebut dipandang sebagai bentuk “pertukaran legitimasi” di mana perusahaan menawarkan transparansi dan kontribusi sosial untuk memperoleh penerimaan publik dan izin moral dalam menjalankan usahanya.

Hal ini semakin signifikan karena perusahaan sering dihadapkan pada tuntutan untuk membuktikan bahwa proyek pembangunan mereka tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan

ekologis. Seperti dikemukakan oleh Mahendra (2022), teori legitimasi mampu memberikan pola pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan properti. Pengungkapan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pertahanan reputasi, terutama ketika perusahaan menghadapi kritik terkait dampak lingkungan proyeknya. Melalui pelaporan CSR yang kredibel, perusahaan berusaha menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan norma masyarakat. Asmara, Indiarto & Porwoko (2024) menambahkan bahwa legitimasi dalam konteks SDGs tidak hanya terkait dengan persepsi sosial, tetapi juga mencakup dimensi moralitas dan keadilan (*propriety and fairness*). Perusahaan yang menanamkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik CSR menunjukkan upaya untuk memperoleh legitimasi yang bersifat normatif yaitu pengakuan bahwa aktivitas bisnis mereka benar secara etis, bukan sekadar patuh secara formal.

Penelitian oleh, Lestari, Suwaji & Muthmainnah (2025) memberikan bukti empiris bahwa legitimasi berperan sebagai variabel penghubung antara pengungkapan dan peningkatan nilai perusahaan. Mereka menemukan bahwa persepsi pasar yang lebih positif, karena investor menilai bahwa keterbukaan terhadap isu lingkungan mencerminkan nilai baik. Temuan ini memperkuat relevansi teori legitimasi dalam konteks penelitian CSR terhadap SDGs, di mana pengungkapan lingkungan berfungsi sebagai bukti nyata komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, dalam penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap SDGs dimensi lingkungan pada perusahaan properti dan real estate, teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan *mengapa* dan *bagaimana* pengungkapan keberlanjutan menjadi sarana strategis

dalam memperoleh dukungan publik dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

2.1.3 Teori Triple Bottom Line

Teori Piramida Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikemukakan oleh Archie B. Carroll pada tahun (1991) yang merupakan salah satu kerangka konseptual paling berpengaruh dalam literatur tanggung jawab sosial perusahaan. Carroll memandang CSR sebagai konstruksi multidimensi yang merefleksikan hubungan perusahaan dengan Kepentingan investor (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal sehingga tanggung jawab perusahaan disusun secara hierarkis ke dalam empat lapisan utama, yakni economic, legal, ethical, dan philanthropic responsibilities, yang digambarkan dalam bentuk piramida untuk menunjukkan tingkat prioritas dan keterkaitannya.

Lapisan dasar dari piramida CSR adalah economic responsibility yang menekankan bahwa tanggung jawab utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan dan menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Perusahaan dipandang sebagai entitas ekonomi yang harus efisien, produktif, dan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya agar dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan investor. Penelitian oleh streimikiene dan Ahmed, (2021) menunjukkan bahwa pemenuhan tanggung jawab ekonomi yang kuat menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi tanggung jawab sosial lainnya, karena stabilitas finansial memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya bagi aktivitas sosial dan lingkungan secara konsisten.

Lapisan kedua adalah legal responsibility yang menegaskan kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah operasinya. Dalam perspektif Carroll, hukum mencerminkan standar minimum perilaku yang diterima masyarakat sehingga kepatuhan terhadap hukum menjadi bentuk kontrak sosial antara perusahaan dan negara. Menurut Nyabakora (2024) menegaskan bahwa perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab legal cenderung memiliki legitimasi sosial yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap keberlanjutan operasional dan kepercayaan publik.

Lapisan ketiga dalam piramida adalah ethical responsibility yang mencakup perilaku dan praktik bisnis yang diharapkan masyarakat meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum. Penelitian Huang dan Watson (2021) menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab etis berperan signifikan dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan mengurangi risiko non-keuangan, seperti konflik sosial dan boikot konsumen.

Lapisan puncak dari piramida CSR adalah philanthropic responsibility yang mencerminkan kontribusi sukarela perusahaan dalam meningkatkan keadilan dan standar hidup masyarakat umum. Menurut Mufida et al, (2024) dalam penelitiannya pada perusahaan di Indonesia menemukan bahwa aktivitas filantropi yang terintegrasi dengan strategi bisnis mampu meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, meskipun secara konseptual dimensi ini bersifat tidak wajib.

Dalam konteks *Corporate Social Responsibility* (CSR) teori TBL berperan sebagai kerangka evaluatif yang menilai keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial,

dan ekologis dari aktivitas bisnis. Penerapan konsep ini menjadi sangat relevan dalam sektor properti dan real estate, karena kegiatan konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan bangunan berimplikasi langsung terhadap degradasi lingkungan, konsumsi energi, serta emisi karbon. Dengan demikian, pendekatan TBL menyediakan kerangka yang terukur bagi perusahaan untuk menginternalisasi prinsip *sustainable development* dalam operasi bisnisnya.

Penelitian oleh Tjahjadi, Soewarno & Mustikaningtiyas (2021) menunjukkan bahwa csr berperan penting dalam memperkuat sinergi antara dimensi ekonomi dan lingkungan. Melalui pendekatan TBL, mereka menemukan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan efektivitas program CSR yang berorientasi pada tujuan jangka panjang. Dengan kata lain, TBL menjadi jembatan antara tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Temuan serupa dikemukakan oleh Gunawan et al., (2023) yang meneliti perusahaan properti di Indonesia, mereka menyatakan bahwa meskipun sebagian besar perusahaan di sektor ini masih menitikberatkan pada kinerja finansial, tekanan dari investor institusional dan kebijakan SDGs mulai mendorong transformasi menuju praktik bisnis hijau. Perusahaan yang mengadopsi prinsip TBL cenderung lebih tahan terhadap risiko sosial dan lingkungan karena mereka memperhitungkan biaya eksternalitas ekologis dalam perencanaan keuangannya. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa integrasi TBL dapat meningkatkan reputasi dan nilai jangka panjang perusahaan di mata stakeholder.

Menurut penelitian Megawati & Pratama (2024), menemukan bahwa pengungkapan keberlanjutan berbasis TBL memiliki korelasi positif terhadap

legitimasi perusahaan publik di (BEI). Laporan keberlanjutan yang berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan investor. Dengan demikian, teori TBL tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga berkontribusi terhadap legitimasi sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori legitimasi.

Siahaan et al, (2025) mengembangkan model pengukuran kinerja berbasis TBL untuk menilai keberlanjutan lanskap pasca-tambang di Indonesia, yang dapat diadaptasi untuk sektor properti dan real estate. Mereka menyarankan bahwa indikator keberlanjutan lingkungan harus mencakup *resource efficiency*, *waste minimization*, dan *carbon footprint management*, serta keterlibatan komunitas lokal. Selain itu, Kuswantoro & Sholihin (2022) menegaskan bahwa penerapan agenda TBL dalam perusahaan swasta di Indonesia berperan penting dalam memperkuat *corporate legitimacy* dan menumbuhkan kesadaran keberlanjutan di kalangan stakeholder. Dalam studi perbandingan antara perusahaan swasta dan BUMN, mereka menemukan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan TBL secara sistematis lebih adaptif terhadap kebijakan nasional SDGs dan lebih dipercaya oleh publik karena kontribusi nyatanya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian Jamaludin & Razali (2024) penerapan TBL pada perusahaan properti di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor properti menjadi kontributor terbesar terhadap dampak lingkungan, namun juga memiliki potensi tertinggi untuk mempercepat pencapaian SDGs melalui inovasi hijau seperti *energy-efficient housing*, *low-carbon materials*, dan

urban greening. Implementasi TBL dalam konteks ini bukan hanya kewajiban etis, tetapi strategi ekonomi jangka panjang yang meningkatkan daya saing global perusahaan.

2.1.4 Corporate Sosial Responsibility (Csr)

Corporate Sosial Responsibility merupakan komitmen berkelanjutan untuk terlibat dalam kegiatan yang beretika dan berkontribusi pada tujuan berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup disamping tujuan operasional perusahaan (Gallo & Serluca, 2020). CSR lingkungan (Corporate Social Responsibility dimensi lingkungan) adalah kebijakan untuk menjalankan operasional dan berkomitmen menjaga lingkungan, termasuk upaya pelestarian, pengurangan polusi, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pelaporan dan transparansi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan (Ramya.S & Baral.r, 2024).

Konsep tanggung jawab sosial berakar dari pemikiran Bowen (1953) yang perusahaan tidak terbatas pada pelaku pasar saham tetapi juga meluas ketidakterbatasan pada pelaku pasar saham tetapi juga meluas ke masyarakat dan lingkungan, diperkuat oleh kajian modern yang menunjukkan evolusi CSR dari aktivitas moral menuju keberlanjutan korporasi yang lebih terstruktur (Saeed et al., 2021). Pada periode globalisasi, terutama sejak 1980-an, teori *stakeholder* Freeman (1984) memperluas ruang lingkup CSR sehingga perusahaan dipandang berkewajiban memperhatikan berbagai kelompok pemangku kepentingan, dan mendorong perusahaan mengintegrasikan CSR dalam praktik bisnis untuk memenuhi standar lingkungan global (Vagin et al., 2022).

Memasuki tahun 2000-an, CSR mengalami pergeseran menjadi bagian dari *corporate governance*, di mana perusahaan mengadopsi CSR sebagai strategi peningkatan reputasi dan kinerja lingkungan yang berhubungan positif dengan peningkatan lingkungan yang baik di daerah operasi perusahaan (Alqubaysi et al., 2024). CSR juga dipandang sebagai investasi strategis yang memperkuat nilai jangka panjang perusahaan (Fallah Shayan et al., 2022). Perkembangan CSR semakin penting sejak munculnya tujuan global (SDGs) pada tahun 2015, CSR kemudian berfungsi sebagai instrumen perusahaan untuk mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang, khususnya di bidang lingkungan seperti efisiensi energi, konservasi air, dan mitigasi perubahan iklim (Gutiérrez-Ponce, 2023). Integrasi CSR dengan SDGs juga meningkatkan transparansi dan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan (Galeazzo, 2024).

Sejak 2020, penelitian CSR menunjukkan fokus yang lebih besar pada isu perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau, CSR yang stabil memiliki intensitas emisi lebih rendah (Saeed et al., 2021). dan menunjukkan kinerja keberlanjutan yang lebih baik (Farida, 2024). Pada sektor property dan real estate, CSR berperan penting dalam mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap SDGs, khususnya yang berkaitan dengan energi, air, kota berkelanjutan, ekosistem laut, dan iklim (Shahid, 2024).

Dalam CSR lingkungan dapat diukur dengan menggunakan gri 300. GRI 300 series merupakan indikator yang secara langsung menggambarkan sejauh mana perusahaan memperhatikan dan mengelola dampak ekologis dari aktivitas bisnisnya. Seri ini memberikan kerangka sistematis bagi perusahaan untuk menilai

dampak kegiatan operasional terhadap sumber daya alam, emisi, dan keberlanjutan ekosistem. Menurut Setiawan & Larasati (2021) GRI 300 mencerminkan bentuk akuntabilitas lingkungan korporasi, di mana perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengungkapkan kegiatan yang bersifat *compliance*, tetapi juga mengukur efisiensi, mitigasi, dan inovasi yang dilakukan untuk menurunkan jejak ekologis (*ecological footprint*). Hal ini sejalan dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan, di mana pelaporan berbasis GRI menjadi tolok ukur kredibilitas dan legitimasi perusahaan di mata stakeholder.

2.1.4.1 Indikator Corporate Sosial Responsibility (CSR) Lingkungan

1. Efisiensi Air dan Sanitasi

Indikator ini menyoroti tanggung jawab perusahaan dalam menjaga ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi berkelanjutan. CSR diarahkan pada teknologi efisien yang mengurangi konsumsi air dan memperbaiki kualitas sanitasi. Penelitian oleh Sati & Nayyar (2024) menegaskan bahwa program CSR yang fokus pada efisiensi air membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6). Selain itu, Silva (2024) menunjukkan bahwa implementasi CSR di sektor penyediaan air berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya air melalui inovasi sistem sanitasi ramah lingkungan.

2. Energi Bersih dan Efisiensi Energi

CSR dalam aspek ini menitikberatkan pada penggunaan energi terbarukan, pengurangan konsumsi energi, dan efisiensi operasional. Pada penelitian Tylzanowski et al., (2023) menemukan bahwa penerapan efisiensi energi memperkuat reputasi dan kinerja lingkungan perusahaan. Huk & Kurowski (2021)

menjelaskan bahwa sektor energi berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan CSR berbasis energi bersih. Selanjutnya, Xia et al., (2021) menekankan pentingnya sistem energi pintar dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi polusi di kota cerdas.

3. Pengelolaan Limbah

Indikator ini berfokus pada inovasi dalam pengelolaan dan daur ulang limbah untuk mendukung ekonomi sirkular. Niyommaneerat & Suwanteep (2023) meneliti proyek CSR yang mengintegrasikan energi terbarukan dan daur ulang plastik guna meningkatkan efisiensi sumber daya. Selain itu, Emmanuel et al., (2024) membuktikan bahwa pengungkapan CSR terkait limbah memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan.

4. Pengurangan Emisi

CSR di bidang ini menitikberatkan pada strategi dekarbonisasi dan investasi energi hijau. Nurunnabi et al., (2020) menunjukkan bahwa efisiensi energi menjadi pendekatan CSR yang efektif dalam mencapai SDG 7 dan 13. Selanjutnya, Tylzanowski et al., (2023) menambahkan bahwa target “zero emission” kini menjadi standar dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Pengurangan Polusi

Upaya pengurangan polusi menjadi bagian penting dari CSR dengan fokus pada kontrol pencemaran udara, air, dan tanah. Penelitian Emmanuel (2024) menemukan bahwa transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi polusi meningkatkan persepsi positif pemangku kepentingan. Sementara Xia et al.,

(2021) juga menegaskan peran teknologi pintar dalam mengurangi beban polusi perkotaan melalui efisiensi energi dan sistem pemantauan otomatis.

6. Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

Indikator ini meliputi konservasi tanah, keanekaragaman hayati, serta praktik penggunaan lahan produktif yang ramah lingkungan. Penelitian Burdiuzha (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan lahan berbasis CSR mampu mendorong efisiensi sumber daya dan mencegah degradasi lingkungan di kawasan Eropa Timur. Selain itu, Kiufeoglu (2024) menyoroti peran pengelolaan limbah dalam mendukung dekarbonisasi dan praktik lahan berkelanjutan di lebih dari 50 studi kasus global.

2.1.4.2 Pengukuran CSR dimensi Lingkungan

Dalam konteks sektor properti dan real estate di Indonesia, penerapan GRI 300 memiliki relevansi yang tinggi karena kegiatan pembangunan dan pengelolaan properti berdampak signifikan terhadap lingkungan. Seperti dijelaskan oleh Mahendra (2022) pengungkapan lingkungan melalui GRI menjadi sarana transparansi perusahaan dalam mengelola sumber daya alam, mengendalikan limbah konstruksi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Seri GRI 300 yang diambil sebagai standar dan dijadikan sebagai standar pengukuran dalam penelitian ini yaitu GRI 301-306 yang terdiri atas enam kategori indikator utama yang mewakili dimensi lingkungan secara komprehensif, yaitu:

1. GRI 301-Materials

Menilai sejauh mana Perusahaan menggunakan bahan baku ramah lingkungan, termasuk daur ulang dan penghematan material dalam proses produksi atau konstruksi.

2. GRI 302-Energy

Mengukur konsumsi energi langsung maupun tidak langsung, serta upaya efisiensi dan transisi menuju energi terbarukan.

3. GRI 303-Water and Effluents

Menganalisis manajemen air, termasuk pengambilan daur ulang dan pembuangan limbah cair. Pengelolaan air bersih menjadi focus utama terutama dikawasan perumahan padat dan proyek high-rise yang memerlukan air besar.

4. GRI 304 – Biodiversity

Mengkaji dampak aktifitas bisnis terhadap keakaragaman hayati, termasuk konservasi habitat dan perlindungan ekosistem. Dalam konteks properti dan real estate ini mencakup Upaya pelestarian ruang terbuka hijau.

5. 305 – Emissions

Menilai emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas emissions*), termasuk strategi mitigasi perubahan iklim, dengan pengungkapan GRI 305 untuk menunjukkan komitmen pengurangan emisi karbon.

6. GRI 306 – Waste

Menilai pengelolaan limbah padat daur ulang dan pencegahan pencemaran lingkungan. Menjadikan semakin baik manajemen perusahaan dalam.

Tabel 2.1 indikator GRI 301-306

No	GRI 301-306	Uraian GRI	Indikator gri
1	GRI 301 Material	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume
		301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
		301-3	Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
2	GRI 302 Energi	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
		302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
		302-3	Intensitas energi
		302-4	Pengurangan konsumsi energi
		302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
3	GRI 303 Air bersih dan Efluen	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya Bersama
		303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
		303-3	Pengambilan air
		303-4	Pembuangan air
		303-5	Konsumsi air
4	GRI 304 Keanekaragaman Hayati	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
		304-2	Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati

		304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
		304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
5	GRI 305 Emisi	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
		305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
		305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
		305-4	Intensitas emisi GRK
		305-5	Pengurangan emisi GRK
		305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
		305-7	Nitrogen oksida (NO _x), belerang oksida (SO _x), dan emisi udara signifikan lainnya
6	GRI 306 Limbah	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
		306-2	Manajemen dampak signifikan terkait limbah
		306-3	Timbulan limbah
		306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
		306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir

Sumber: Global Reporting Initiative 2016

Menurut Kurniawati & Mujiyati (2022) pengukuran CSR berbasis GRI dilakukan dengan menghitung tingkat pengungkapan item CSR dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan menggunakan content analysis, nilai CSRI yang tinggi menunjukkan tingkat transparansi dan tanggung jawab lingkungan yang lebih

baik. rumus yang digunakan untuk menghitung indeks pengungkapan CSR (CSR Disclosure Index atau CSRI) adalah sebagai berikut:

$$CSRI = \frac{\text{Jumlah item CSR yang diungkapkan}}{\text{Jumlah total item CSR dalam GRI 300}}$$

Sebagai contoh, jika GRI 300 memiliki 29 indikator, dan perusahaan mengungkapkan 24 indikator, maka nilai indeksnya adalah:

$$CSRI = \frac{24}{29} = 0.83 \text{ atau } 83\%$$

penelitian Megawati & pratama (2024) mengungkapkan bahwa pengungkapan berbasis GRI berperan penting dalam meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan di mata investor hijau (*green investors*).

2.1.5 Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs (Sustainable Development Goals) adalah bagian tujuan PBB yang mendunia tahun 2015 untuk memastikan kesejahteraan serta keadilan bagi semua pada tahun 2030 (Yumnam et al., 2024). Gagasan tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) berakar dari sejarah panjang perkembangan konsep pembangunan global pasca Perang Dunia II, Setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, dunia internasional mulai mengkaji ulang arah pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan (Pandey, Bansal, & Awasthi, 2025). Transformasi konseptual tersebut berlanjut pada periode *Millennium Development Goals* (MDGs) yang

dideklarasikan pada tahun 2000 melalui *United Nations Millennium Declaration*, menjelang akhir periode MDGs pada 2015, evaluasi menunjukkan adanya ketimpangan pencapaian antarnegara, serta minimnya perhatian terhadap isu lingkungan dan ketimpangan ekonomi, Untuk mengatasi hal tersebut, Sidang Umum PBB ke-70 pada 25 September 2015 menetapkan *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, yang memuat 17 tujuan dan 169 target global (García-Martín, 2025).

Menurut García & Martín (2025) lahirnya SDGs menandai perubahan paradigma dari pembangunan yang bersifat sektoral menuju pembangunan yang integratif dan universal. Menurut Prayogi & Nasrullah (2025) menekankan bahwa terbentuknya SDGs juga dipengaruhi oleh pentingnya pendidikan dan kesadaran sejarah terhadap nilai-nilai keberlanjutan, pembelajaran sejarah dipandang sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap urgensi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kesadaran kolektif menjadi landasan moral dalam merumuskan agenda global yang lebih manusiawi dan berorientasi lingkungan. Menurut, Stavytskyy & Dligach (2025) menjelaskan bahwa krisis ekonomi global dan ketimpangan distribusi sumber daya sejak awal 2000-an menjadi pemicu utama bagi PBB untuk merancang tujuan pembangunan yang lebih resilien dan adil, sistem ekonomi dunia yang tidak berkelanjutan telah menciptakan kesenjangan struktural yang hanya dapat diatasi melalui pendekatan global yang menyatukan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Romanchuk, Abramova & Moros (2024) menunjukkan bahwa pengalaman negara-negara Eropa dalam mengembangkan komunitas pedesaan berkelanjutan menjadi inspirasi penting bagi pembentukan

kerangka kebijakan SDGs, Kajian ini memperlihatkan bagaimana pendanaan pembangunan pedesaan diintegrasikan dengan prinsip keberlanjutan yang kini diadopsi secara global dalam Agenda 2030.

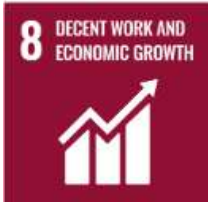
Salles, Giordani & Biagi (2024) menjelaskan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan gerakan progresif sangat menentukan dalam menekan negara-negara anggota PBB untuk memperluas agenda pembangunan yang lebih inklusif dan menekan bahwa prinsip “leave no one behind” dalam SDGs lahir dari advokasi kelompok masyarakat yang menuntut keadilan sosial, gender, dan lingkungan. Tafese & kopp (2025) melalui analisis bibliometrik menegaskan bahwa peran pendidikan menjadi kunci dalam mendukung pembentukan dan implementasi SDGs. Shayan et al., (2022) menegaskan bahwa SDGs lingkungan merupakan tujuan keberlanjutan yang komprehensif dan digunakan sebagai kerangka strategis untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melaporkan dampak lingkungan menjadi bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan yang bertujuan agar lingkungan yang lebih baik.

Tabel 2.2 17 Sustainable Development (SDGs) dan penjelasannya

No	gambar	Tujuan (Goal)	Penjelasan singkat	Jumlah Target
1		Tanpa Kemiskinan (No Poverty)	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, (Sorooshian, 2024)	7 target

2		Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, (Ogunbode, 2025)	8 target
3		Kehidupan Sehat & Sejahtera (Good Health & Well-Being)	Menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, (El Tantawi, 2024)	13 target
4		Pendidikan Berkualitas (Quality Education)	Menjamin pendidikan inklusif, merata, berkualitas, dan kesempatan belajar sepanjang hayat, (Akintolu & Adewoye, 2024)	10 target

5		Kesetaraan Gender (Gender Equality)	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan & anak Perempuan, (Aaikia, Verma & Chakrborty, 2025)	9 target
6		Air Bersih & Sanitasi (Clean Water & Sanitation)	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, (Ogunbode, 2025)	8 target
7		Energi Terjangkau & Bersih (Affordable & Clean Energy)	Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern (Dzunushalieve & Teuber, 2024)	5 target

8		Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work & Economic Growth)	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif & berkelanjutan, pekerjaan produktif dan layak, (Triandari, 2025)	12 target
9		Industri, Inovasi & Infrastruktur (Industry, Innovation & Infrastructure)	Membangun infrastruktur tangguh, industri inklusif & berkelanjutan, serta mendorong inovasi (Hidayat, Putri & Sukardi, 2024)	8 target
10		Pengurangan Ketimpangan (Reduced Inequalities)	Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara (Kwilinski., dkk, 2024)	10 target
11		Kota & Pemukiman Berkelanjutan (Sustainable Cities & Communities)	Membuat kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	10 target

		Cities & Communities)	(Dzunushalieve & Teuber, 2024)	
12		Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab (Responsible Consumption & Production)	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Triandari, 2025)	11 target
13		Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)	Mengambil tindakan mendesak untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya (Sorooshian, 2024)	5 target
14		Ekosistem Laut (Life Below Water)	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya laut (El (Tantawi et al, 2024)	10 target

15		Ekosistem Daratan (Life on Land)	Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. (Dzunushalieve & Teuber, 2024)	12 target
16		Perdamaian, Keadilan & Institusi Tangguh (Peace, Justice & Strong Institutions)	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, akses keadilan untuk semua, dan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level (Sorooshian, 2024)	12 target
17		Kemitraan untuk Tujuan	Memperkuat sarana pelaksanaan dan	19 target

		(Partnerships for the Goals)	merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (makhura, 2024)	
--	---	------------------------------	---	--

Sumber: united Nations 2015

2.1.5.1 Sustainable Development Goals dimensi lingkungan

Kluza et al (2021) mengatakan indikator sdgs lingkungan dalam pencapaian tujuan lingkungan yaitu SDGS 6 (air bersih dan sanitasi), SDGS 7(energi bersih dan terjangkau), SDGS 11(kota dan komunitas yang berkelanjutan), SDGS 13(penanganan perubahan iklim, SDGS 14(ekosistem laut), dan SDGS 15(ekosisten darat). Berikut penjelasan mengenai indikator SDGS dimensi lingkungan menurut penelitian terdahulu:

1. SDGS 6 (air bersih dan sanitasi) menurut Bain et al. (2020) menyoroti sdgs yang mengukur akses air minum aman, ketersediaan, dan bebas kontaminasi.
2. SDGS 7 (energi bersih dan terjangkau) menurut Singh dan Ru (2022) melakukan tinjauan literatur tentang indikator SDG 7 menekankan pentingnya inovasi teknologi, kebijakan, dan kolaborasi untuk mempercepat pencapaian energi bersih.
3. SDGS 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan) menyoroti pentingnya distribusi manfaat lingkungan yang adil akses transportasi publik,

kualitas udara, ruang terbuka hijau, yang dilihat dari Tingkat polusi udara, akses transportasi publik, dan serta menyoroti pentingnya distribusi manfaat lingkungan yang adil, (Hsu et al, 2020).

4. SDGS 13 (penanganan perubahan iklim) sangat penting dalam sinergi dan keadilan iklim dalam aksi perubahan iklim (Filho et al., 2023). indikator sdgs 13 menyoroti strategi pengurangan risiko bencana, emisi gas rumah kaca, dan integrasi pendidikan perubahan iklim (Hwang et al, 2021).
5. SDGS 14 (ekosistem laut) mencakup status stok ikan, area laut yang dilindungi, tingkat eutrofikasi, dan sampah plastik laut, (Andriamahefazafy et al, (2022).
6. SDGS 15 (ekosistem darat) menyoroti terhadap alam sekitar meliputi luas hutan, lahan terdegradasi, keanekaragaman hayati, dan perlindungan ekosistem, (Fraisl et al., 2020).

2.2 Regulasi Tanggung Jawab Sosial Dan Tujuan Keberlanjutan

a. Undang-Undang No. 40 Pasal 74 UU Tahun 2007

UU No. 40 Tahun 2007 menjadi ketentuan pertama yang dijadikan mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai kewajiban korporasi. Pasal 74 menegaskan Daya Alam dituntut untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. konteks ini bukan sekadar bentuk filantropi, melainkan instrumen hukum yang melekat pada keberadaan badan hukum PT.

Secara akademik CSR di bawah UUPT mengandung dua dimensi normatif:

1. Dimensi legal-etis, yakni kewajiban hukum sekaligus moral perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Dimensi fungsional, yaitu upaya perusahaan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut E. Nuriyatman et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi Pasal 74 UUPT masih menghadapi tantangan dalam mekanisme pelaporan dan evaluasi CSR, di mana sebagian besar perusahaan belum memiliki indikator keberlanjutan yang terukur (litigasi, 2024). Dengan demikian, UU No. 40/2007 berfungsi sebagai payung hukum yang memaksa korporasi, khususnya di sektor SDA, memiliki bertanggung jawab sosial dan lingkungan disetiap bisnis mereka.

b. Undang-Undang No. 47 tahun 2012

Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 merupakan turunan dari Pasal 74 UUPT yang memperjelas ruang lingkup, perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan TJSL. Regulasi ini mengatur bahwa pelaksanaan CSR harus menjadi bagian dari rencana kegiatan perusahaan, dibiayai dari anggaran perusahaan, dan dilaporkan dalam laporan tahunan. Secara akademik, PP 47/2012 menegaskan prinsip “propriety and reasonableness” artinya, setiap pelaksanaan CSR harus sesuai kemampuan dan kewajaran perusahaan, namun tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurut R. Margono (2025), ketentuan ini menjadikan CSR sebagai salah satu pilar negara kesejahteraan modern (welfare state) karena menempatkan tanggung jawab sosial dalam struktur hukum Perusahaan. RPK Sari dan A. Satory (2025) menyoroti bahwa PP 47/2012 belum

memiliki kekuatan sanksi yang memadai, sehingga efektivitas penerapan CSR masih bergantung pada kesadaran manajerial Perusahaan.

C. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017

POJK No. 51/2017 diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai transformasi paradigma CSR ke dalam kerangka “keuangan berkelanjutan” (sustainable finance), Regulasi ini mengharuskan lembaga jasa keuangan dan emiten untuk menyusun *Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan* (RAKB), melaksanakan kebijakan CSR/TJSL sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan, serta menyampaikan *Laporan Keberlanjutan* (*Sustainability Report*) setiap tahun. Dalam konteks akademik, POJK 51/2017 memperluas konsep CSR dari aktivitas sosial menjadi kewajiban strategis dalam tata kelola korporasi (corporate governance) yang mendukung pencapaian SDGs melalui pembiayaan hijau, inklusi keuangan, dan transisi energi. Menurut C. Glennisa, R. Martusa, dan M. Meythi (2024) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap POJK 51/2017 berpengaruh terhadap transparansi pengungkapan CSR perusahaan publik di Indonesia.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Sumiyati., 2023)	Pengaturan csr dalam rangka	Pengaturan Csr,	Pengaturan csr dalam rangka

		percepatan Pembangunan sosial dan lingkungan di indonesia	Pembangunan sosial, dan Pembangunan sosial	percepatan Pembangunan sosial dan lingkungan mampu memberikan kontribusi besar bagi bagi lingkungan dan bermanfaat bagi perusahaan
2.	Karagianno poulou et al., (2023)	Tanggung jawab sosial Perusahaan: strategi bisnis yang mempromosikan transisi lingkungan energi dan memerangi volatilitas di dunia pasca- pandemi.	Tanggung jawab sosial perusahaan, strategi bisnis, esg, keberlanjutan, volatilitas	Csr sangat berpengaruh positif pada operasi keberlanjutan Perusahaan sehingga menjadikan Perusahaan dilirik oleh investor
3.	Shayan et al., (2022)	Tujuan Pembangunan	Tanggung jawab sosial,	Csr berpengaruh positif terhadap

		berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka kerja tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR)	tujuan pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan	Pembangunan berkelanjutan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kinerja perusahaan
4.	Zhivko Maksym., (2022)	Tanggung jawab sosial Perusahaan di dalam kontek ekonomi hijau	Tanggung jawab sosial, ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan	Csr sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan Perusahaan mencapai indikator kinerja yang lebih tinggi.
5.	Syahrain et al., (2025)	Pengembangan Masyarakat sekitar pertambangan melalui CSR PT NHM sebagai	Pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, komunitas	Csr secara langsung dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan memberikan manfaat bagi Masyarakat sekitar Perusahaan.

		implementasi SDG-12	pengembangan dan empowerment program, PT Nusa Halmahera Minerals.	
6.	Rathobei et al., (2024)	Mengeksplorasi penciptaan nilai yang luas dalam pertambangan- tanggung jawab perusahaan dan manajemen pemangku kepentingan dalam praktik	Tanggung jawab sosial Perusahaan, manajemen pemangku kepentingan	Penerapan csr dalam strategi Perusahaan dapat meningkatkan cakupan pemangku kepentingan yang teridentifikasi
7	Ebekozien et al., (2024)	Kerangka tanggung jawab sosial Perusahaan yang	Tanggung jawab sosial, staf junior, pembangunan	Tanggung jawab sosial Perusahaan sangat berpengaruh dalam mendorong

		diperluas: peran sektor swasta dalam meningkatkan kepemilikan rumah staf junior untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan 11	berkelanjutan 11	kerangka kerja untuk meningkatkan kepemilikan staf junior sektor swasta Nigeria dan mencapai sdgs 11 dan targetnya.
8.	Setiawan et al., (2021)	Konseptual CSR untuk pencapaian SGDSs di Indonesia	Tanggung jawab sosial Perusahaan, tujuan Pembangunan berkelanjutan	Penerapan tanggung jawab sosial bagi Perusahaan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap Pembangunan berkelanjutan Perusahaan
9.	(Us et al., 2023)	Tanggung jawab sosial	Tanggung Jawab Sosial	Tanggung jawab sosial Perusahaan

		Perusahaan dan pengembangan energi terbarukan untuk merek hijau dalam SDGs: tinjauan Meta-Analitik	Perusahaan, pengembangan energi, merek hijau, Pembangunan keberlanjutan	dan pengembangan energi terbaru berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi hijau
10.	Adebayo, Y, A., Ikeveju, A, H., Kwakye, J, M., & dkk., (2024)	Tanggung jawab sosial perusahaan dibidang minyak dan gas: menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dan kelestarian lingkungan	Tanggung jawab Perusahaan, pertumbuhan bisnis, dan kelestarian lingkungan	Tanggung jawab sosial Perusahaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bisnis dan inovasi perusahaan
11	(Zhang & Hao, 2024)	Tanggung jawab sosial Perusahaan	Tanggung jawab sosial Perusahaan,	Penerapan csr dengan tujuan keberlanjutan sangat

		sebagai jalan menuju keberlanjutan: tinjauan cangguh dalam ekonomi asia	keberlanjutan strategi bisnis	berpengaruh positif dalam mendorong ekonomi Perusahaan di berbagai sektor di asia.
12	(Kurniawati & Mujiyati., 2022)	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosial dan tanggung jawab lingkungan pengungkapan properties, real estate dan Perusahaan kontruksi	Tanggung jawab sosial, pelaksanaan sosial, pengungkapan tanggung jawab sosial	pengungkapan CSR dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kinerja lingkungan.
13	(Mahendra, 2022)	Pengaruh fundamental terhadap tanggung jawab	Tanggung jawab sosial, ROA, conversi rasio	pengungkapan CSR yang tinggi berkontribusi positif terhadap kinerja

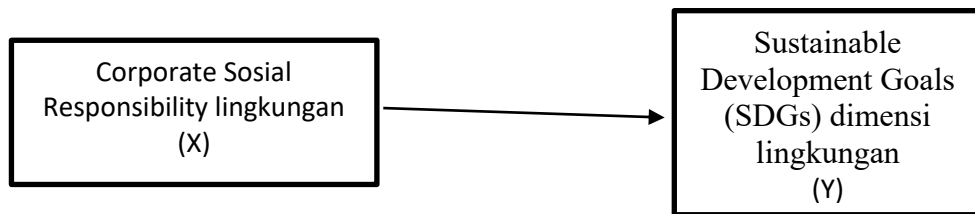
		sosial Perusahaan		lingkungan, sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam mendukung pencapaian SDGs.
14	Yuliasi, u & Susetyo, B., (2020)	Pengaruh pengungkapan Corporate Sosial Responsibility dan Kinerja lingkungan terhadp Upaya pencapaian Sustainable Development Goals 2030	Csr , kinerja keeuangan, SDGs	Corporate Sosial Responsibility dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals
15	Pamungkas et al., (2024)	Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara Akuntansi Hijau	Corporate sosial responsibility, Green accounting, Sustainable	Corporate sosial responsibility memiliki dampak positif terhadap Sustainable development goals,

		dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	development goals,	
--	--	--	-----------------------	--

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan kausal positif antara tanggung jawab sosial sebagai variabel independen (X) dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dimensi lingkungan sebagai variabel dependen (Y). Secara teoritis, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas operasional yang menjadi instrumen strategis perusahaan yang sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Shayan et al., 2022).

Pelaksanaan CSR yang berorientasi lingkungan berfungsi sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mencapai tujuan SDGs dimensi lingkungan khususnya SDG 6 (air bersih dan sanitasi), SDG 7 (energi terjangkau dan bersih), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 13 (Aksi Iklim), serta SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air) dan SDG 15 (Kehidupan di Darat). Kluza et al (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR berdampak terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan CSR yang diarahkan pada rehabilitasi daerah aliran sungai dan penghijauan terbukti mendukung pencapaian SDGs di tingkat local. berdasarkan pada hal di atas dijelaskan kerangka pikir:



Gambar 2.1 kerangka konseptual

2.5 Hipotesis penelitian

2.5.1 Pengaruh Penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Dimensi Lingkungan

Corporate sosial responsibility merupakan kebijakan dalam menjalankan bisnis jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan serta menyeimbangkannya antar aspek sosial dan lingkungan serta menyeimbangkan ke tujuan ekonomi Perusahaan (Dewi & Narayama 2020). praktik CSR yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan dampak langsung terhadap pencapaian tujuan SDG dimensi lingkungan. Pamungkas et al. (2024) Penelitian Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara Akuntansi Hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menemukan bahwa CSR memiliki dampak yang positif terhadap pencapaian SDGs, meskipun CSR ditempatkan dalam hubungan moderasi dengan Green Accounting. Artinya, perusahaan yang menerapkan CSR cenderung juga menunjukkan kemajuan pencapaian target SDGs secara lebih baik.

Penelitian Ramadani & Putra (2024) tentang Tanggung Jawab Sosial Upaya kebijakan Lingkungan terhadap Kinerja Bisnis Manufaktur menggunakan sampel perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2021. Di sini hipotesisnya adalah bahwa CSR dan kinerja lingkungan akan berpengaruh positif terhadap aspek perusahaan yang pada gilirannya mendukung pencapaian SDGs (lingkungan) karena perusahaan dengan CSR kuat biasanya memiliki kinerja lingkungan yang baik. Hasilnya menyatakan CSR secara signifikan dikaitkan dengan dampak positif terhadap nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja lingkungan.

Penelitian Mahendra (2022) pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang tinggi berkontribusi positif terhadap kinerja lingkungan, sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam mendukung pencapaian SDGs. CSR dalam sektor ini menjadi penting karena aktivitas konstruksi berdampak langsung terhadap ekosistem, penggunaan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Megawati & Pratama (2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan lingkungan berbasis GRI 300, semakin besar kontribusi perusahaan terhadap pencapaian SDGs dimensi lingkungan. Maka dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian pertama adalah:

H1: penerapan CSR berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan sustainable development goals dimensi lingkungan